

**PENGUATAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF
MEMBEBASAKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DARI
PORTALISASI MODEL PENDIDIKAN MEDIS KE MODEL
PENDIDIKAN SOSIAL**



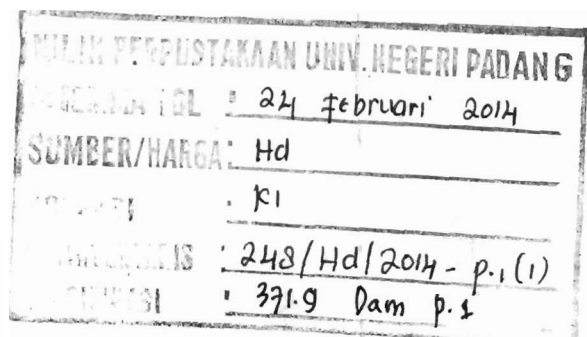
Drs.DAMRI, M.Pd.



**JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

DISAMPAIKAN DALAM

**"SEMINAR INTERNASIONAL DAN TEMU ILMIAH
DI UPI BANDUNG 2011**



ABSTRAK

DAMRI, PLB. PADANG 2014,

STRENGTHENING THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION AS THE REALIZATION FREEING CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS PORTALISASI MODEL OF MEDICAL EDUCATION TO EDUCATION SOCIAL MODEL

Implementantasi strengthening inclusive education must continue to fight for and carried out systematically and professionally. Realization of freeing education from portalisasi ABK medical education model to a social education model is a keharusan. seruan, international expectations and demands are semangkin clear, consequently, all layers including the Indonesian nation must implement them in accordance with their respective conditions. without any poltalisasi / stagnation

Reorientation aims, to change the paradigm of dependency and captivity into activities under the freedom of access and social adaptive regulatory system that starts from the real tindak akan receive and manage a diverse student population. Now is the right moment for a change, so the assumption of normality and the role of schools in terms of get the same rights, in degrees that fit for purpose and noble purposes are not questioned and challenged again. Education of children with special needs has changed from the approach / medical category to be a 'soft' to enter the door of the social population.

Hope we all should become a reality, in the broader context of life, although it still feels the constraints that have not been any inequality in educational institutions / schools implement inclusion education, passion diminishing its implementation may be due to the presence of vacancies is still theoretical, in terms of many of the writings of postmodern and involvement of pragmatic idealism that underlies the existence of inclusive education as an expression Skrtic & Sailor, 1996). Children with special needs should be present in the free environment of regular schools, learning together * with his colleagues without special needs, and fully participate in academic activities, and socially as members of other kelas. Pendapat (Lipsky & Gartner, 1996; Oremland, Flynn, & Kieff, 2002; Skrtic & Sailor, 1996). Inclusion is the practice of building a heterogeneous classrooms where every child trying to achieve individual goals. That requires modifying the curriculum and / or the environment to ensure its success.

Implementing inclusive education, reform and restructuring of the school system should do, (Bergsma, 2000). Where the school must provide a learning environment that is committed to accommodate the diverse needs of children. (Eleweke & Rodda, 2002). Inclusive education focuses on system changes in accordance with the child-socially anak. sehingga can guarantee they can live a decent center of a community.

By : DAMRI, PLB. PADANG 2014

Abstrak

PENGUATAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF MEMBEBAHKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DARI PORTALISASI MODEL PENDIDIKAN MEDIS KE MODEL PENDIDIKAN SOSIAL

Penguatan Implementasi pendidikan inklusi terus diperjuangkan dan dilaksanakan secara sistematis dan profesional. Realisasi dari membebaskan pendidikan ABK dari portalisasi model pendidikan medis ke model pendidikan sosial adalah suatu keharusan. Seruan, harapan dan tuntutan internasional sudah semakin jelas, konsekuensinya, semua lapisan termasuk bangsa Indonesia harus melaksanakannya sesuai dengan kondisi masing-masing tanpa ada portalisasi/stagnasi.

Reorientasi ini bertujuan, mengubah paradigma dari ketergantungan dan keterkukungan menjadi keleluasaan akses dan aktivitas dibawah sistem regulasi sosial adaptif yang dimulai dari tindakan nyata menerima dan mengelola siswa yang beragam populasinya. Sekarang adalah momen yang tepat untuk sebuah perubahan, sehingga asumsi normalitas dan peran sekolah dalam hal mendapatkan hak sama, dalam derajat yang sesuai dan untuk tujuan-tujuan yang mulia tidak dipertanyakan dan ditantang lagi. Pendidikan anak berkebutuhan khusus telah berubah dari pendekatan/kategori medis menjadi pendekatan 'lunak' untuk masuk ke pintu populasi sosial.

Harapan kita semua hendaknya menjadi kenyataan, dalam kontek kehidupan yang lebih luas, meskipun masih terasa berbagai kendala yakni belum meratanya setiap lembaga pendidikan/sekolah melaksanakan pendidikan Inklusi, gairah penyelenggaraannya kian menurun mungkin disebabkan masih terdapatnya kekosongan teoritis, pada banyak hal tulisan-tulisan post modern serta keterlibatan pragmatis dari idealisme yang mendasari keberadaan pendidikan inklusi seperti ungkapan Skrtic & Sailor, 1996. Anak-anak dengan kebutuhan khusus harus hadir di lingkungan bebas sekolah sekolah regular, belajar bersama dngan rekan-rekannya tanpa kebutuhan khusus, dan sepenuhnya berpartisipasi dalam kegiatan akademik, dan sosial sebagai anggota kelas. Pendapat lain (Lipsky & Gartner, 1996; Oremland, Flynn, & Kieff, 2002; Skrtic & Sailor, 1996) inklusi adalah praktek membangun ruang kelas heterogen di mana setiap anak berusaha untuk mencapai tujuan individunya. Untuk itu dibutuhkan memodifikasi kurikulum dan/atau lingkungan untuk memastikan keberhasilannya.

Menyelenggarakan pendidikan inklusif, reformasi dan restrukturisasi sistem sekolah harus dilakukan (Bergsma, 2000). Dimana sekolah harus menyediakan lingkungan belajar mengajar yang berkomitmen untuk mengakomodasi kebutuhan anak yang beragam (Eleweke & Rodda, 2002). Pendidikan Inklusif berfokus pada perubahan sistem yang sesuai dengan anak-anak. Sehingga dapat menjamin secara sosial mereka bisa hidup dengan layak ditengah-tengah masyarakat.

Penguatan Implementansi pendidikan inklusi harus terus diperjuangkan dan dijamin secara sistematis dan profesional. Realisasi dari membebaskan pendidikan ABK dari portalisasi model pendidikan medis ke model pendidikan sosial adalah suatu keharusan. Seruan, harapan dan tuntutan antara bangsa sudah semakin jelas, akibatnya, semua lapisan termasuk Bangsa Indonesia harus melaksanakannya sesuai dengan kondisi negara masing-masing tanpa ada portalisasi.

Pengubah suaian ini bertujuan untuk mengubah paradigma dari pergantungan dan keterkungkungan menjadi keleluasaan akses dan aktivitas dibawah sistem peraturan sosial penyesuaian yang bermula dari tindakan nyata menerima dan menguruskan pelajar yang berbeda-beda populasinya. Sekarang adalah saat yang tepat untuk sebuah perubahan, sehingga andai normalitas dan peranan sekolah mendapatkan hak sama, dalam derajat yang sesuai dan untuk tujuan yang mulia tidak boleh dipersoalkan dan dijabarkan lagi. Pendidikan anak berkebutuhan khusus telah berubah dari pendekatan/kategori perubahan menjadi pendekatan 'lembut' untuk masuk ke pintu penduduk sosial.

Harapan ini hendaknya menjadi kenyataan, dalam konteks kehidupan yang lebih luas, walaupun masih terasa berbagai halangan yakni belum meratanya setiap institusi pendidikan/sekolah melaksanakan pendidikan Inklusi, gairah penyelenggaraannya kian menurun mungkin disebabkan masih terdapatnya kekosongan teorinya, pada banyak hal tulisan-tulisan pasca modern serta penglibatan pragmatik dari idealisme yang mendasari kewujudan pendidikan inklusi (seperti ungkapan Skrtic & Sailor 1996) anak - anak dengan keperluan khas perlu hadir di persekitaran bebas sekolah sekolah regular, belajar bersama dengan rekan-rekannya tanpa keperluan khas, dan sepenuhnya mengambil bahagian dalam kegiatan akademik, dan sosial sebagai ahli kelas. Pendapat lain (Lipsky & Gartner, 1996; Oremland, Flynn, & Kieff, 2002; Skrtic & Sailor, 1996). Kemasukan adalah amalan membina ruang kelas heterogen di mana setiap anak berusaha untuk mencapai tujuan individunya. Untuk itu diperlukan penyesuaian kurikulum dan/ atau untuk memastikan kejayaannya .

Melaksanakan pendidikan inklusif, berarti melaksanakan reformasi dan penstrukturan sistem sekolah (Bergsma, 2000). Sekolah harus menyediakan proses belajar mengajar yang berkomitmen untuk menampung keperluan anak yang berbeda-beda (Eleweke & Rodda, 2002). Pendidikan Inklusif menumpukan pada perubahan sistem yang sesuai dengan anak-anak sehingga dapat memastikan secara sosial mereka boleh hidup dengan layak ditengah-tengah masyarakat.

Konsep akomodir tersebut dipandang ideal sehingga mendapat respon positif dari semua pihak, sementara ada usaha-usaha para praktisi pendidikan di lapangan mulai mencoba mempraktekkan prinsip-prinsip pendidikan yang dapat mengakomodasi kebutuhan setiap anak. Namun demikian, konsep tentang pendidikan kebutuhan khusus dan inklusi harus secara terus menerus diperkenalkan kepada para pendidik dan calon pendidik, agar pemahaman tentang pendidikan inklusif semakin dipahami dan diterima.

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Pendidikan Inklusif

Semua faktor yang dibahas di atas berpengaruh pada perkembangan pendidikan inklusif. Semuanya memberikan kekuatan dan tantangan sebagai berikut: pengaruh kekuatan kelemahan gerakan peningkatan mutu sekolah terfokus pada perubahan sistem yang tanggap terhadap keanekaragaman masih dapat mengabaikan anak penyandang cacat dan kebutuhan khususnya akan akses pendidikan luar biasa keterampilan dan metodologi khusus untuk memungkinkan anak penyandang cacat memiliki akses ke pendidikan. Banyak kalangan profesional PLB masih mendukung segregasi dan merasa terancam oleh inklusi. Organisasi penyandang cacat dan organisasi orang tua, memastikan inklusi benar-benar memberikan manfaat kepada anak dan dilengkapi dengan sumber daya yang tepat.

Dalam mempromosikan partisipasi para stakeholder, kelompok yang memperjuangkan hak individu/kelompok anak penyandang cacat tidak memfokuskan pada perubahan jangka panjang. Tantangan inklusi terhadap komunitas tunarungu dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat, mempromosikan hubungan yang erat antara keluarga, masyarakat dan sekolah tidak mengubah system sendirian, tetapi sangat penting untuk perubahan sistematis top-down yang efektif.

B. Implementasi pendidikan inklusif ke dalam Praktek pendidikan

1. Tantangan dan Peluang

Banyak orang mengira bahwa untuk menuangkan ide pendidikan inklusif ke dalam prakteknya hanyalah sekedar memperkenalkan teknik dan metode yang spesifik agar setiap anak dapat belajar. Metode ini punya tempatnya sendiri dan dapat memancing perdebatan lebih mendalam tentang pendidikan inklusif, tetapi dengan metode saja tidak akan menghasilkan program pendidikan inklusif yang tepat dan berkesinambungan. Tiga 'bahan utama' yang diajukan untuk menghasilkan organisme yang dinamis dan kuat yang dapat beradaptasi, tumbuh dan bertahan dalam berbagai konteks. Ketiga bahan utama itu adalah: 1) kerangka kerja yang kuat rangka (nilai, keyakinan, prinsip dan indikator keberhasilan); 2) implementasi dalam konteks dan budaya local (mempertimbangkan situasi praktis, penggunaan sumber-sumber yang tersedia dan faktor-faktor budaya setempat); 3) partisipasi secara berkesinambungan dan refleksi diri (siapa yang harus dilibatkan, bagaimana, apa dan kapan). Secara bersama-sama, ketiga bahan utama tersebut dapat menghasilkan sistem pendidikan yang fleksibel, kuat, sesuai tempat dan berkesinambungan yang menginkluskikan semua anak.

Dasawarsa terakhir ini kita menyaksikan tumbuhnya berbagai model praksis Pendidikan Inklusif di berbagai budaya dalam bermacam-macam konteks. Sering kali contoh-contoh ini merupakan cara terbaik untuk belajar mengimplementasikan pendidikan inklusif, karena meskipun ini bukan cetak biru, tetapi banyak tantangan dan kesempatan yang telah direspon dengan berbagai cara yang kreatif. Contoh-contoh studi kasus dari negara-negara di Afrika, Asia, Timur Tengah, Amerika Tengah dan Eropa Timur menunjukkan adanya semua aspek 'bahan utama' yang sangat inspiratif adalah contoh dari masyarakat yang sangat miskin. Guru, stakeholder bersama masyarakat mengambil inisiatif untuk menghadapi tantangan dan mengatasi hambatan, serta berpartisipasi secara berkesinambungan. Kita dapat menggunakan model yang sederhana untuk menganalisis hambatan dan mengajukan solusi sesuai dengan konteks masing-masing.

a. Implementasi di dalam budaya dan konteks lokal

Aktifitas PUS terletak pada level Negara. “(Kerangka Aksi Dakar, alinea 16)” Menempelkan daging pada tulang telanjang dari Kerangka Pendidikan Inklusif harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a) Situasi praktis
- b) Sumber-sumber daya yang tersedia (orang, keuangan, materi)
- c) Faktor-faktor budaya sangat berkaitan dengan penciptaan situasi dan gambaran

Sumber-sumber dan topik diskusi sangat banyak, namun banyak juga orang berargumen ‘mereka tidak dapat melaksanakan pendidikan inklusif, karena tidak memiliki sumber daya dan materi yang cukup.’ Namun demikian keterbatasan sumber bukan hambatan terhadap inklusi. *Enabling Education Network* mengadakan sebuah simposium berjudul ‘Mengatasi Hambatan Keterbatasan Sumber Daya Materi Pendidikan Inklusi’ dengan kutipan sebagai berikut:

Anda mempunyai pemikiran yang kaku tentang inklusi, yang menyebabkan anda berpikir kaku juga tentang sumber. Jika anda mempunyai pemikiran yang fleksibel tentang inklusi, maka harus pula memiliki sikap fleksibel. Hal ini dibutuhkan karena berbagai keterbatasan penyelenggaraan pendidikan inklusi antara lain berkenaan dengan sumber terbatasnya sumber daya manusia, kurang pengetahuan, ketakutan, prasangka, terlalu terspesialisasi, kompetisi, kurang pengalaman menghadapi perbedaan, pemikiran yang stereotype, yang dan materi, kurangnya peralatan, gaji yang rendah, sumber-sumber tidak terdistribusikan secara merata, bangunan tidak aksesibel, pengetahuan dan informasi, kurangnya keterampilan baca/tulis, kebijakan yang buruk atau tidak ada kebijakan sama sekali, kurangnya berbagi masalah dan pemecahannya secara kolektif. Kondisi di atas menuntut perjuangan, stamina yang tidak pernah menyerah seperti sikap yang ditunjukkan peserta forum seminar E.ENET “Kami tidak punya, jadi kami tidak dapat melakukan”. Fokusnya lebih pada “ingin memiliki”, bukan pada “keadaan saat ini”. Pada seminar E.ENET, peserta dari Selatan menantang dengan mengatakan: “Inilah kami, maka kami melakukan!” Jika kita merupakan SDM dan masyarakat yang berakal, maka kita akan dapat mengatasinya.

b. Refleksi diri dan partisipasi yang berkelanjutan dari semua pihak

Isu tentang partisipasi dan demokrasi sekarang telah menjadi isu sentral inklusi, untuk dapat merespon dan mengatasi perbedaan-perbedaan yang kita jumpai di masyarakat,

fleksibilitas dan kolaborasi sangat dibutuhkan dengan semua pihak agar dapat dipastikan pendidikan Inklusif tetap hidup, tumbuh, dan terselenggara sepanjang masa atau sepanjang mereka masih memerlukannya.

Penguatan implementasi pendidikan inklusi dari model medis ke model sosial harus dikembangkan melalui proses penyelenggaraan pendidikan yang transparan, demokratis dan melibatkan para stakeholder, terutama perwakilan anggota masyarakat, pemimpin masyarakat, orang tua, siswa, organisasi, pejabat pemerintah, kaum profesional di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan sektor tenaga kerja non-pemerintah dan masyarakat sipil (Pernyataan Dakar tentang rencana aksi nasional, paragraph 3, 4, 9), “Organisasi penyandang cacat dan organisasi orang tua seyogyanya dilibatkan pada semua level”. (Peraturan Standar, Peraturan 6, Paragraf 3).

c. Bagaimana Partisipasi Dapat Dicapai?

Pendekatan belajar partisipatori, dapat dipandang sebagai suatu metodologi praktis yang reflektif untuk memfasilitasi hal ini. Sumber-sumber ini dapat memberikan banyak ide. Akan tetapi, pada akhirnya partisipasi itu terkait secara integral dengan inti nilai-nilai, prinsip-prinsip serta konteks dan budaya lokal, sehingga akan lebih baik apabila metode itu dikembangkan secara kreatif, kolaboratif dan dalam situasi lokal. Beberapa pelajaran penting yang dapat ditarik dari pengalaman dengan pendekatan partisipatori meliputi:

- 1) Agar partisipasi itu sungguh-sungguh bukan sesuatu yang semu, perlu ada komitmen yang kuat dan praktis terhadap nilai-nilai yang mendasarinya. Ini memerlukan kesadaran diri dan sadar akan perilaku sendiri.
- 2) Kemauan untuk mendengarkan, kritis kepada diri sendiri, dan ‘mau mengakui kesalahan’.
- 3) Adanya hubungan kekuasaan perlu diakui dan diperhatikan.
- 4) Orang tua sering merasa kurang memiliki kewenangan dari pada guru. Oleh karena itu, upaya khusus perlu dilakukan untuk mengundang mereka ke sekolah atau mengunjungi mereka di rumahnya untuk mendengarkan keprihatinannya “Guru yang berpartisipasi dalam penelitian tindakan partisipatori”.
- 5) Pengetahuan dan persepsi lokal harus dihargai dan dimanfaatkan. Misalnya, pengetahuan ibu tentang perilaku anaknya sendiri, kelebihanannya, kekurangannya.
- 6) Keterampilan dan pengetahuan dalam metodologi partisipatori perlu dikembangkan orang-orang tertentu secara alami dapat melakukannya dengan baik, tetapi kebanyakan

dari kita perlu belajar dan berlatih untuk dapat menguasainya. Misalnya, kemampuan untuk mendengarkan dengan baik sangat sulit bagi kebanyakan orang, terutama jika orang yang harus didengarkan itu berkesulitan untuk mengekspresikan dirinya dengan baik, atau harus mengekspresikannya melalui penerjemah.

- a. Menggunakan sebanyak mungkin jenis pendekatan pembelajaran. Misalnya, melalui mendengarkan, menggambar, bercerita, diagram, gambar, bermain peran, modeling, wayang, drama, dll.

e. Kapan dan Dalam Hal Apa?

Partisipasi diperlukan pada semua proses Pendidikan Inklusif seperti

- a. Mengembangkan sistem, proses dan indikator tentang partisipasi itu sendiri.
- b. Mengumpulkan data awal, studi kelayakan
- c. Mengembangkan kebijakan
- d. Menyetujui nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip
- e. Mengidentifikasi hambatan inklusi
- f. Mengembangkan indikator keberhasilan
- g. Implementasi pada semua level
- h. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi nilai dan keyakinan, dan prinsip-prinsip indikator.
- i. Siapa yang harus dilibatkan? Bagaimana mereka harus dilibatkan? Kapan dan dalam hal apa? situasi praktis Anda, sumber-sumber, faktor budaya.

f. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Pendidikan Inklusif

Semua faktor yang dibahas di atas berpengaruh pada perkembangan pendidikan inklusif.

Semuanya memberikan kekuatan dan tantangan sebagai berikut:

Pengaruh Kekuatan Kelemahan Gerakan Peningkatan Mutu Sekolah terfokus pada perubahan sistem yang tanggap terhadap keanekaragaman dan masih dapat mengabaikan anak penyandang cacat dan kebutuhan khususnya akan akses Pendidikan Luar Biasa. Keterampilan dan metodologi khusus untuk memungkinkan anak penyandang cacat memiliki akses ke pendidikan yang didukung oleh profesional PLB dengan program segregasi dan merasa terancam oleh inklusi.

Organisasi Penyandang Cacat dan Organisasi Orang tua memastikan inklusi benar-benar memberikan manfaat kepada anak dan dilengkapi dengan sumber daya yang tepat. Mempromosikan partisipasi para stakeholder dengan kelompok yang memperjuangkan hak-hak individu kelompok/anak penyandang cacat, tidak memfokuskan pada perubahan jangka panjang. Tantangan inklusi dan komunitas tunarungu dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat Mempromosikan hubungan yang erat antara keluarga, masyarakat dan sekolah, tidak mengubah sistem sendiri, tetapi sangat penting untuk perubahan sistematis top-down yang efektif. Contoh keberhasilan inklusi menunjukkan bahwa pendidikan inklusif dapat dilaksanakan dalam berbagai konteks dan budaya, dan bahwa hambatan dapat diatasi Pendidikan inklusi.

2. Penguatan Implementasi Pendidikan Inklusi Sebagai realisasi

a. Terbukanya Portal Dari Model Medis Ke Model Sosial

Realisasi pendidikan inklusi merupakan kompleksitas perspektif yang harus diteruskan secara berkelanjutan, sistematis dan profesional. Konsekuensi dari tuntutan itu adalah harus terus menyediakan lembaga pendidikan dan tetap menerima dan menempatkan anak pada sekolah-sekolah khusus/reguler dengan dasar perlakuan keseimbangan hak yang berbeda atau sebaliknya mendapat perlakuan yang sama. Dengan demikian, hak partisipasi harus diberikan kepada suatu kelompok dengan ketentuan bahwa hak-hak kelompok lain (dan terutama dari 'mayoritas') tidak terabaikan. Selanjutnya Smith (1998: 164) berpendapat pada kondisi lain "hak individu" sering ditafsirkan oleh beberapa kalangan profesional yang mungkin berbeda dengan kepentingan umum untuk 'kebaikan bersama' harus dilindungi dengan undang-undang, kepastian politik dan ketentuan-ketentuan/persyaratan yang ketat. Transformasi/transisi ke pendidikan inklusi harus dipandu terus dengan tetap menyeimbangkan hak-hak minoritas dan mayoritas.

Reorientasi model medis ke model sosial sudah saatnya dilakukan demi menyediakan ruang kehidupan dan bekal kehidupan yang sama. Kondisi ini merupakan langkah dan pendekatan organisasi untuk melihat sekolah sebagai organisasi yang memiliki potensi yang memicu dan memacu menerapkan perubahan menjadi lebih inklusif. Sehubungan dengan hal di atas, Black- Hawkins. et al. (2007: 8) mengatakan "pendekatan inklusif dipandang sebagai suatu proses. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menyediakan, sistem, sarana-sarana, perluasan akses, dan menghapus ketidaksetaraan sekaligus didukung oleh komitmen dan usaha bersama untuk mengatasi masalah.

Sekolah inklusif yang melayani populasi siswa yang beragam dan kontradiktif harus tetap berusaha meningkatkan prestasi semua siswa mereka. Sumber daya pendidikan harus disediakan terutama bagi siswa yang bersulit belajar di sekolah, yang disebut oleh *Warnock Report* (DES, 1978) sebagai integrasi 'lokasional'. Pemisahan tidak boleh terjadi, mereka harus berada di situs yang sama. Selanjutnya isu-isu krusial yang perlu dipertimbangan adalah diplomasi, pendekatan dan perjuangan politik karena penyelenggaraan pendidikan inklusi masih banyak menghadapi tantangan. Leo dan Barton (2006) berpendapat bahwa komitmen dan kebijaksanaan pendidikan inklusi sulit di pertahankan larna di dalam praktek-praktek pendidikan masih banyak ditemukan, tantangan yang lebih besar, terutama berkenaan dengan pengembangan sekolah, kepemimpinan, kendala strutural dimana sekolah inklusi itu beroperasi, sehingga diperlukan sebuah model model kepemimpinan sekolah inklusi antara lain pemimpin sekolah harus memiliki moral yang mengakui nilai-nilai moral, sosial, selalu bekerja dan berusaha untuk mengatasi kendala mampu mempengaruhi komunitas sekolah, mampu berinteraksi, berkolaborasi, terus mengembangkan professional dan menemukan peluang perubahan yang dibutuhkan serta mampu mencari sumber daya tambahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang beragam.

b. Penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan Inklusi di Provinsi Sumatera Barat.

Di Sumatera Barat, pelaksanaan pendidikan inklusif telah dimulai dari tahun 2004, proses penyelenggaraanya dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan (SMU/SMK). Data/informasi tahun 2010, Sekolah inklusif berjumlah 91 tersebar di 13 Kabupaten/Kota. Konsep pembelajarannya didukung oleh lingkungan yang ramah dimana guru bersama siswa dalam suatu komunitas sekolah, guru menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran, guru mendorong partisipasi aktif anak dalam belajar, guru memiliki minat dan kegairahan dalam memberikan pelayanan pendidikan.

Penetapan dan pembinaan sekolah inklusif, diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, di Kota akan dibangun Lembaga/Center pendidikan Autis. Sedangkan lembaga pendidikan yang menyiapkan tenaga kependidikan luar biasa/inklusi dilaksanakan oleh Jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang dengan memasukkan kedalam kurikulum universitas sebagai mata kuliah pilihan dan mewajibkan kepada seluruh jurusan pada

Fakultas Ilmu Pendidikan dengan beban 2 SKS. Berkaitan dengan tenaga pengajar dan pendidikan sekolah inklusi diserahkan langsung ke sekolah-sekolah yang melaksanakannya. Apabila sekolah tersebut mengalami hambatan, maka terus mengadakan koordinasi dan bantuan oleh guru GPK (Guru Pendidikan Khusus) yang terdiri dari tenaga/alumni PLB

Tantangan nyata dalam mengimplementasikan sekolah inklusif dapat dibagi dua antara lain:

a. Tantangan dari tenaga pendidik

- 1) Guru di Sekolah merasa tidak memiliki ilmu untuk mendidik anak bekebutuhan khusus karena bukan berlatar belakang pendidikan Luar Biasa.
- 2) Kurangnya tenaga untuk membantu anak secara individual dalam memberi layanan bimbingan.
- 3) Tidak memiliki pengalaman sebelumnya sehingga takut seandainya anak bekebutuhan khusus tidak akan sukses belajar di sekolah regular.
- 4) Takut akan prestasi sekolah dalam bidang akademik menjadi rendah
- 5) Merasa sekolah regular menjadi penyelenggara Sekolah Luar Biasa.
- 6) Kurikulum yang tidak fleksibel karena Kurikulum nasional yang menghendaki agar ketuntasan belajar sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga sekolah tidak dapat meraih nilai sesuai dengan kompetisi yang dilakukan.

b. Tantangan dari segi dana

- 1) Terbatas dana untuk membayar gaji guru PLB jika guru PLB akan dijadikan sebagai guru pembimbing khusus
- 2) Tidak ada dana untuk membeli alat peraga khusus
- 3) Tidak ada dana untuk program keterampilan

Keuntungan pendidikan inklusi bagi siswa adalah:

- a. Sejak dini siswa memiliki pemahaman yang baik terhadap adanya perbedaan dan keberagaman.
- b. Munculnya sikap empatik pada siswa terdorong secara alamiah.
- c. Munculnya budaya saling menghargai dan menghormati pada siswa.
- d. Menurunkan terjadinya stigma dan labeling kepada semua anak dan khususnya pada anak tertentu.

- e. Timbulnya budaya koperatif dan kolaboratif pada siswa sehingga memungkinkan adanya saling bantu satu sama lain.

Keuntungan bagi guru adalah:

- a. Lebih tertantang untuk mengembangkan berbagai metode dalam mensiasati pembelajaran.
- b. Bertambahnya kemampuan dan pengetahuan guru tentang keberagaman siswa termasuk keunikan, karakteristik, dan sekaligus kebutuhannya.
- c. Terjalannya komunikasi dan kolaborasi kemitraan antar guru (guru regular dan guru khusus) dan dengan ahli lainnya.
- d. Bertambahnya pemahaman bahwa siswa memberikan informasi kepada guru.
- e. Berkurangnya stigma dan labeling terhadap ABK yang dilakukan oleh guru.
- f. Menumbuh kembangkan sikap empatik guru terhadap siswa yang didalamnya termasuk siswa yang berkebutuhan khusus.

Bagi Otoritas Pendidikan keuntungannya adalah:

- a. Memberikan kontribusi yang sangat besar bagi program penuntasan wajib belajar diknas 9 tahun.
- b. Memberikan peluang terjadinya pemerataan pendidikan bagi semua kelompok masyarakat.
- c. Menggunakan biaya yang relatif lebih efisien.
- d. Mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
- e. Meningkatkan kualitas layanan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif serta menyenangkan.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan, bahwa:

1. Atas dasar gerakan, tuntutan dan seruan internasional, serta tuntutan Hak Asasi Manusia, sekaligus sejalan dengan perkembangan kesadaran dan perbaikan diri manusia akan memuliakan kemanusiaan manusia yang semakin meningkat, maka implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagai salah satu bentuk realisasi reorientasi pendidikan ABK dari model medis ke model sosial harus terus disambut positif, dikuatkan, dan didukung bersama-sama terutama komunitas pendidikan Luar biasa secara khusus dan komunitas sosial/non PLB pada umumnya.
2. Saatnya kini keluarga besar PLB menyiapkan konsep yang lebih profesional, argumentatif dan fungsional untuk menyiapkan grand disain model pendidikan dari medis ke model sosial, sehingga dapat menjawab segala bentuk kendala kini dan yang akan datang dengan memberikan implikasi dan ruang kehidupan sosial yang lebih baik buat komunitas anak berkebutuhan khusus, dan masyarakat luas yang peduli.

Sumber Bacaan

1. Alimin, Zaenal (2004) Reorientasi Pemahaman Konsep Pendidikan Khusus Ke pendidikan
2. Ainscow, M., Booth, T. and Dyson, A. (2006) *Improving Schools, Developing*
3. Anslow, Mel (1997), Towards Inclusive Scholing, Article ini British Journal of Special Education No 1/ 1997, 3-6
4. Anupara, Ahuya, Dkk (2005) Abstracts International Symposium " inclusion and the Removal of Barriers to Learning, Participation and Development ", West Sumatera Indonesia.
5. Allan, J. (2008) *Rethinking Inclusive Education: The Philosophers of Difference in Practice* .Dordrecht: Springer.
6. Kebutuhan Khusus dan Implikasinya terhadap Layanan Pendidikan.
7. 1 (52-63)
8. Berit H. Johnsen (2003) Pengenalan Sejarah Pendidikan Kebutuhan Khusus menuju Inklusi, sebuah konteks Norwegia dan Eropa (Introduction to History of Special Needs Education towards Inclusion), PPS Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.

9. Bruner J. (1990) The effectiveness of early intervention for at-risk and handicapped children. San Diego. CA Academic Press.
10. David. J Smith, Dean, (1998) Inclusion Schools for all Students. International Thomson Publishing Southren Africa.
11. Direktorat PLB (2004) Buku Paket, Pendekatan Pendidikan Inklusif, Ditjen Dikdasmen, Depdikbud, Jakarta.
12. Direktorat PLB, Braillo Norway, (2004) Buku Paket LIRP: Menciptakan Lingkungan Inklusif yang Ramah dalam Pembelajaran, Direktorat PLB Ditjen Dikdasmen Depdiknas, Jakarta.
13. Duns, C.J dan Deal (1998) Enabling and empowering families : principles and giadenlines for practice, Cambidge, MA Brookline Bools.
14. Foreman, Phil (2002), Integration and Inclusion In Action. Mc Person Printing Group: Australia.
15. Galager, (1990), Hanbook of Early Childhood Intervention, Cambridge,Cambridge University Press.
16. *Inclusio* London: Routledge.
17. Johsen, Berit and Skjorten D. Miriam, (2001) Education, Special Needs Education an Introduction. Unifub Porlag: Oslo 5.
18. Jurnal Asesmen dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus. Vol.3 No 1 (52-63)
19. Lewis, Vicky (2003), Development and Disability. Bickwell Publishing Company:
20. Padstow, Cornwall. Stubbs, Sue (2002) Inclusive Education: Where there are few resources. The Atlas Alliance: Gronland , Oslo.Label: Pendidikan Inklusif
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa 18
- 20 Thomas, G. and Loxley, A. (2001) *Deconstructing Special Education and Constructing Inclusion* . Buckingham: Open University Press.
- 21 Tomlinson, S.(1982)*A Sociology of Special Education* London: Routledge Kegan Paula

